

An aerial photograph of a fishing boat with a large net in the ocean. The net is spread out in a large, irregular shape, and the boat is positioned in the center of the net. The water is a deep blue color, and the net is a lighter blue color. The boat has a red and white striped pattern on its side. The net is made of a fine mesh and is spread out in a large, irregular shape. The boat is positioned in the center of the net. The water is a deep blue color, and the net is a lighter blue color. The boat has a red and white striped pattern on its side.

LAPORAN RINGKASAN (Bahasa Indonesia)

**Empowering Women, Peace and Security in the Coral Triangle:  
Menjembatani Sipil-Militer dan Antar Negara Untuk Memerangi  
Kejahatan Lingkungan Maritim**

Cover image: ArtRachen01

## Daftar Isi

<b>Tentang Proyek Kerjasama Lintas Batas WPS serta Kejahatan Lingkungan Maritim di Kawasan Coral Triangle</b>	<b>3</b>
Cara Menggunakan Laporan Ringkasan	4
<b>Pengantar Kejahatan Lingkungan Maritim</b>	<b>5</b>
Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU) serta Kejahatan Konvergensi Perikanan	5
Perikanan IUU dan Konvergensi Kejahatan Perikanan di Kawasan Coral Triangle	6
Perdagangan Satwa Liar di Kawasan Coral Triangle	6
Polusi Laut di Kawasan Coral Triangle	7
<b>Dinamika Gender Dalam Keamanan Lingkungan Maritim</b>	<b>7</b>
Perempuan dan Lingkungan Maritim	8
Dampak Kejahatan Lingkungan Maritim dari Sisi Gender	9
<b>Implementasi WPS dalam Kejahatan Lingkungan Maritim</b>	<b>12</b>
Mengetahui Agenda WPS	12
Menerapkan Agenda WPS pada Keamanan Lingkungan Maritim	13
Pilar Partisipasi dalam Agenda WPS dan Keamanan Lingkungan Maritim	13
Pilar Perlindungan dalam Agenda WPS dan Keamanan Lingkungan Maritim	14
Pilar Pencegahan dalam Agenda WPS dan Keamanan Lingkungan Maritim	14
Pilar Pertolongan dan Pemulihan dalam Agenda WPS serta Keamanan Lingkungan Maritim	14
<b>Kerjasama Sipil-Militer dalam Mengendalikan Kejahatan Lingkungan Maritim di Kawasan Coral Triangle: Keuntungan Bekerja Sama dengan Organisasi Perempuan</b>	<b>15</b>
Batasan dan Tantangan Hubungan Sipil-Militer	15
Bentuk Kerjasama Ideal Antara Sipil-Militer	16
<b>Gender dalam Kerangka Regional dan Kerjasama Lintas Batas</b>	<b>17</b>
Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)	17
Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU)	18
ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGF)	18
Partnership in Environmental Management for the Seas of Asia (PEMSEA)	18
<b>Perempuan, Hukum Adat, dan Situasi Keamanan Maritim</b>	<b>19</b>
<b>Rekomendasi Tindakan untuk Meningkatkan Integrasi Kerjasama Sipil-Militer Berperspektif Gender untuk Mengatasi Kejahatan Lingkungan Maritim Lintas Batas</b>	<b>19</b>
<b>Kesimpulan</b>	<b>21</b>

# TENTANG PROYEK KERJASAMA LINTAS BATAS WPS SERTA KEJAHATAN LINGKUNGAN MARITIM DI KAWASAN CORAL TRIANGLE

Laporan ini adalah ringkasan dari laporan utama *Empowering Women, Peace and Security in the Coral Triangle: Bridging Civil-Military and State Boundaries to Tackle Maritime Environmental Crimes* (Hanya tersedia dalam bahasa Inggris).

Laporan ini memberikan gambaran tentang kerjasama lintas batas terkait Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) serta kejahatan lingkungan maritim dalam Proyek Serial Workshop Coral Triangle ('the Project') yang dilaksanakan oleh Pacific Forum International, lembaga *think tank* yang berbasis di Honolulu yang bekerja sama dengan U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) Office of Women, Peace and Security.

The Project mempersembahkan proyek penelitian dan dua workshop yang dilaksanakan di tahun 2024: virtual workshop pengantar selama 2 hari, diikuti workshop hybrid/tatap-muka selama dua hari. Rangkaian workshop ini mewadahi perwakilan-perwakilan dari LSM, militer, pemerintah, dan lembaga penegak hukum dari Indonesia, Papua Nugini, dan Timor-Leste untuk mengeksplorasi interseksi gender dan kejahatan lingkungan maritim. Workshop bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana kejahatan lingkungan maritim dan ketidakamanan memengaruhi perempuan dan gadis di kawasan Coral Triangle, serta mengidentifikasi pendekatan sensitif gender terbaik saat menanggapi kejahatan lingkungan maritim. Selain itu, workshop bertujuan untuk memperkuat kolaborasi sipil-militer di setiap negara dan menghubungkan organisasi masyarakat sipil dengan organisasi militer lintas batas.

Diterbitkan Juli 2024

## Penulis Laporan

### Lily Schlieman

Analyst

The Center for Advanced Defense Studies  
United States

### Maryruth Belsey Priebe

Gender in Health and Climate Security Co-Lead  
Director for WPS Programs and Senior Fellow  
Pacific Forum International

### Charity Borg

WPS Fellow  
Pacific Forum  
United States

### Anny Barlow

Regional Maritime Security & Policy Assessment  
Specialist  
Maritime Security Consultants  
United States

### Tevvi Bullock

Gender in Health and Climate Security Co-Lead  
Pacific Forum International

Laporan ini adalah ringkasan dari laporan utama: *Empowering Women, Peace and Security in the Coral Triangle: Bridging Civil-Military and State Boundaries to Tackle Maritime Environmental Crimes*. Silakan lihat Laporan Utama untuk daftar lengkap kontributor pada Proyek Gender in Health and Climate Security.

**Catatan Penting:** Laporan ini mencerminkan pandangan dan opini dari para penulis, serta mereka yang dikutip secara langsung, dan tidak boleh diartikan sebagai dokumen konsensus. Baik Komando Indo-Pasifik AS maupun Pacific Forum tidak mengambil posisi institusional terkait isu-isu yang dibahas di dalamnya.

## Cara Menggunakan Laporan Ringkasan

Laporan ini berisi ringkasan dari laporan utama bertajuk *Empowering Women, Peace and Security in the Coral Triangle: Bridging Civil-Military and State Boundaries to Tackle Maritime Environmental Crimes Major Report*. Laporan ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengatasi kompleksitas penerapan perspektif gender ketika menangani kejahatan lingkungan maritim di kawasan Coral Triangle terutama dalam konteks sipil-militer. Bagian ‘cara penggunaan’ ini akan memberikan gambaran singkat pemanfaatan Laporan Ringkas yang dikembangkan untuk membantu LSM, pasukan pertahanan dan keamanan, serta pembuat kebijakan pemerintah untuk menciptakan respons keamanan lingkungan maritim yang lebih kolaboratif dan inklusif. Mengakui pentingnya keberadaan program kesetaraan gender yang mudah diakses, Laporan ini memperingkas Laporan Utama menjadi alat praktis untuk mengatasi norma gender yang merugikan dan memajukan kesetaraan gender dalam pekerjaan keamanan lingkungan maritim.

**Bab 1: Pengantar Kejahatan Lingkungan Maritim:** Ketidakamanan lingkungan maritim merupakan ancaman signifikan bagi komunitas pesisir dan ekonomi biru, terutama di wilayah Indo-Pasifik. Bab ini menekankan bahwa degradasi lingkungan – seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan satwa liar, dan polusi, di antara ancaman lainnya – semakin meningkat dan diperlukan adanya pendekatan yang bijak dan responsif gender untuk mengatasi tantangan ini.

**Bab 2: Dinamika Gender dalam Keamanan Lingkungan Maritim:** Memahami pentingnya interseksi antara gender, kelestarian lingkungan maritim, serta keamanan nasional dan internasional dalam isu keamanan manusia. Bab ini membahas isu keamanan manusia yang seringkali terkait dengan isu keamanan nasional dan internasional.

**Bab 3: Implementasi WPS dalam Kejahatan Lingkungan Maritim:** Agenda WPS menyediakan kerangka kerja untuk memahami berbagai ketidakamanan yang terkait dengan gender. Bab ini mengeksplorasi cara menerapkan agenda WPS pada tantangan yang dihadapi dalam lingkungan maritim.

**Bab 4: Kerjasama Sipil-Militer dalam Mengendalikan Kejahatan Lingkungan Maritim di Kawasan Coral Triangle: Keuntungan Bekerja Sama dengan Organisasi Perempuan:** Cara efektif yang jarang dieksplorasi untuk mengintegrasikan perspektif gender yang bersifat interseksional ke dalam perencanaan manajemen bencana adalah melalui kerjasama sipil-militer dalam meningkatkan pengetahuan dan kepemimpinan perempuan serta LSM perempuan. Bab ini berisi gagasan-gagasan praktis dalam mengeksplorasi kebutuhan vital untuk strategi keamanan maritim yang inklusif, efektif, dan berfokus pada keamanan manusia.

**Bab 5: Gender dalam Kerangka Regional dan Kerjasama Lintas Batas:** Bab ini memberikan gambaran kerangka kerja keamanan lingkungan maritim regional yang ada, dan membahas kerangka mana yang saat ini mengandung perspektif gender dan mana yang memerlukan revisi untuk mempertimbangkan aspek gender.

**Bab 6: Perempuan, Hukum Adat, dan Situasi Keamanan Maritim:** Bab ini memperlihatkan hukum, jalur kebijakan dan kerangka kerja internasional dalam mengintegrasikan perspektif gender ke perencanaan keamanan maritim.

**Bab 7: Rekomendasi Tindakan untuk Meningkatkan Integrasi Kerjasama Sipil-Militer Berperspektif Gender untuk Mengatasi Kejahatan Lingkungan Maritim Lintas Batas:** Laporan ini diakhiri dengan daftar rekomendasi tindakan yang dikembangkan selama proyek berlangsung dan disepakati oleh Komunitas Praktisi baru yang dibentuk oleh para peserta.

# PENGANTAR KEJAHATAN LINGKUNGAN MARITIM

Perikanan dan ekosistem laut di kawasan Coral Triangle secara langsung mendukung ketahanan pangan dan mata pencaharian lebih dari 120 juta orang di wilayah tersebut,<sup>1</sup> dan secara tidak langsung mendukung 350 juta orang lainnya.<sup>2</sup> Kejahatan lingkungan maritim seperti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), kejahatan konvergensi perikanan, polusi plastik, perusakan habitat, dan perdagangan satwa liar membahayakan kesehatan stok ikan, habitat laut, dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Kejahatan-kejahatan ini berdampak pada mata pencaharian komunitas yang bergantung pada sumber daya laut dan ketahanan mereka terhadap guncangan perubahan iklim. Berikut ini adalah gambaran beberapa kejahatan laut yang paling mencolok dan umum terjadi.

## Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU) serta Kejahatan Konvergensi Perikanan

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) adalah masalah kompleks yang mencakup berbagai praktik penangkapan ikan ilegal yang mempengaruhi lingkungan laut secara global. Ini mempengaruhi perikanan skala kecil maupun industri dan terjadi di perairan pesisir hingga internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mendefinisikan penangkapan ikan ilegal sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin atau melanggar hukum negara tersebut. Ini juga mencakup kegiatan yang melanggar hukum nasional atau komitmen internasional, seperti yang disepakati oleh negara-negara yang bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO). Penangkapan ikan tidak dilaporkan mengacu pada kegiatan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak akurat kepada otoritas nasional, merusak pengelolaan perikanan dengan memanipulasi penilaian stok ikan. Penangkapan ikan tidak diatur terjadi di area yang tidak memiliki manajemen perikanan, seperti di laut lepas.<sup>3</sup> Penggunaan racun, bahan kimia berbahaya, atau bahan peledak, penggunaan alat tangkap ilegal, melebihi kuota, dan perburuan liar juga termasuk praktik perikanan IUU.<sup>4</sup>

Kejahatan perikanan juga terjadi di luar penangkapan ikan IUU, seperti pencucian uang, kejahatan pajak, pemalsuan dokumen, penipuan makanan, penipuan identitas, penyuapan, korupsi, dan perdagangan satwa liar.<sup>5</sup> Seringkali kejahatan-kejahatan ini berjalan berdampingan bersama dengan aktivitas-aktivitas ilegal lain seperti pembajakan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan senjata. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kejahatan-kejahatan konvergensi ini sering dilakukan oleh jaringan kriminal transnasional yang

---

<sup>1</sup> UN Department of Economic and Social Affairs, "The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)," United Nations, accessed June 10, 2024,

<https://sdgs.un.org/partnerships/coral-triangle-initiative-coral-reefs-fisheries-and-food-security-cti-cff>.

<sup>2</sup> UN Department of Economic and Social Affairs, "The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)," United Nations, accessed June 10, 2024,

<https://sdgs.un.org/partnerships/coral-triangle-initiative-coral-reefs-fisheries-and-food-security-cti-cff>.

<sup>3</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations, "What Is IUU Fishing? | Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing," accessed June 7, 2024, <https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/i>

<sup>4</sup> Gohar A. Petrossian, "Preventing Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: A Situational Approach" 189 (September 2015): 39–48.

<sup>5</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, "Fisheries Crime: Transnational Organized Criminal Activities in the Context of the Fisheries Sector" (Vienna, Austria: UNODC), accessed June 26, 2023,

[https://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus\\_sheet\\_PRINT.pdf](https://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf).

terorganisir.<sup>6</sup> FAO memperkirakan kerugian ekonomi global akibat penangkapan ikan IUU berkisar antara \$10 miliar hingga \$23 miliar per tahun, dengan 11-26 juta metrik ton ikan dipanen secara ilegal, yang mewakili sekitar seperlima jumlah ikan di seluruh dunia.<sup>7</sup>

## Perikanan IUU dan Konvergensi Kejahatan Perikanan di Kawasan Coral Triangle

Luas negara Indonesia, Papua Nugini (PNG), dan Timor-Leste mencakup setengah dari keseluruhan wilayah Coral Triangle.<sup>8</sup> Penangkapan ikan IUU dan kejahatan perikanan konvergensi di ketiga negara tersebut merugikan ketahanan pangan, ekonomi, dan ekologi masing-masing negara. Praktek penangkapan ikan seperti penggunaan racun, bahan peledak, dan alat tangkap ilegal, merusak habitat laut penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau, yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak dan migrasi stok ikan yang bernilai komersial, megafauna karismatik, dan spesies kunci.<sup>9</sup> Proyek Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase 2 (ATSEA-2) memperkirakan kerugian ekonomi Indonesia akibat penangkapan ikan IUU sekitar \$70,26 juta dari tahun 2015-2019, \$8,84 juta untuk PNG pada tahun 2016 dan 2018-2019, dan \$30 juta untuk Timor-Leste pada tahun 2018.<sup>10</sup>

Pemerintah negara-negara ini menunjukkan tingkat kemauan dan kapasitas penegakan hukum yang bervariasi dalam memerangi kejahatan-kejahatan ini. Mantan Menteri Indonesia, Susi Pudjiastuti (2015-2019), mengambil sikap tegas dengan memblokir 90% penangkapan ikan IUU oleh kapal asing dan menenggelamkan 556 kapal penangkap ikan ilegal asing.<sup>11</sup> Sebaliknya, kemampuan PNG dan Timor-Leste sangat terbatas dalam pemantauan, pengendalian, pengawasan (MCS), dan penegakan hukum, sehingga ditarget perusahaan perikanan asing yang sering melakukan pelanggaran IUU, terutama China.<sup>12</sup>

## Perdagangan Satwa Liar di Kawasan Coral Triangle

Perdagangan satwa liar, sebuah kejahatan lingkungan maritim yang sangat menguntungkan, melibatkan pemanenan dan penjualan satwa liar beserta produknya untuk makanan, obat-obatan, hewan peliharaan, dan bahan pakaian. Kejahatan ini sering dikaitkan dengan perburuan liar dan aktivitas ilegal lainnya, seperti penangkapan ikan IUU, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pemalsuan dokumen. Keanekaragaman hayati dan perbatasan maritim yang

---

<sup>6</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, "Fisheries Crime: Transnational Organized Criminal Activities in the Context of the Fisheries Sector."

<sup>7</sup> United Nations, "International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: The Toll of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," United Nations (United Nations), accessed June 7, 2024, <https://www.un.org/en/observances/end-illegal-fishing-day>.

<sup>8</sup> Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security, "The Coral Triangle Atlas," accessed June 8, 2024, <http://ctatlas.coraltriangleinitiative.org/About>.

<sup>9</sup> Sukanan Darunee, "Illegal Fishing Endangers Both Ecosystems and Food Security," July 18, 2019, <https://www.sustainability-times.com/environmental-protection/illegal-fishing-wreaks-havoc-with-marine-ecosystems/>.

<sup>10</sup> Arie Afriansyah et al., "Baseline Estimates Of RPOA-IUU Participating Countries" (Indonesia: Faculty of Law Universitas Indonesia, March 2021), [https://atsea-program.com/wp-content/uploads/2023/01/Final-Report\\_Baseline-Estimates-RPOA-IUU\\_FIN\\_\\_organised\\_2.pdf](https://atsea-program.com/wp-content/uploads/2023/01/Final-Report_Baseline-Estimates-RPOA-IUU_FIN__organised_2.pdf).

<sup>11</sup> Center for Strategic and International Studies (CSIS), "Legacies, Lessons and Lobsters: Indonesia's Maritime Policy in a Post-Susi World," January 15, 2020, <https://www.csis.org/analysis/legacies-lessons-and-lobsters-indonesias-maritime-policy-post-susi-world>.

<sup>12</sup> ATSEA, "Wave of Collaborations: Joint Actions in Enhancing Coastal Communities Livelihoods," Newsletter, ATSEA Newsletter (ATSEA, March 2023), [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-04/2023-Q1\\_E-newsletter\\_draft\\_Final.docx\\_compressed.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-04/2023-Q1_E-newsletter_draft_Final.docx_compressed.pdf).

terbuka lebar di kawasan Coral Triangle menjadikannya kawasan rentan untuk aktivitas-aktivitas ini.<sup>13</sup> Terlebih, Indonesia, PNG, dan Timor-Leste adalah sumber ikan maw, teripang, kima raksasa, penyu, hiu, pari, burung, reptil, dan mamalia darat langka, serta spesies kunci yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan mereka relatif terhadap populasinya. Kehidupan laut yang kaya di wilayah ini ditarget secara ilegal dan dijual di pasar gelap, sementara hasil tangkapan yang sesuai aturan pun jumlahnya sering kali tidak dilaporkan secara akurat. Transportasi maritim sangat penting untuk operasi perdagangan satwa liar di kawasan Coral Triangle, dan kegiatan ini dilakukan oleh aktor dalam berbagai skala, mulai dari skala perorangan hingga jaringan kriminal terorganisir berskala besar.<sup>14</sup>

## Polusi Laut di Kawasan Coral Triangle

Polusi laut di kawasan Coral Triangle berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah plastik, tumpahan minyak dan pembuangan bahan kimia yang berdampak buruk pada ekosistem laut dan komunitas pesisir.<sup>15</sup> Polutan dapat mengalir dari darat ke laut melalui angin dan sungai, terutama di musim hujan. Penebangan hutan, pertambangan, pertanian, dan pembangunan di darat menghasilkan polutan kimia dan sedimen yang merusak ekosistem laut penting seperti terumbu karang dan padang lamun.<sup>16</sup> Polutan dari pupuk meningkatkan kadar fosfat dan nitrat yang mengakibatkan ledakan populasi alga yang beracun bagi kehidupan laut dan manusia. Munculnya spesies invasif karena pelepasan ikan akuarium ke alam liar secara tidak bertanggung jawab serta operasi akuakultur dan marikultur yang tidak memiliki keamanan hayati yang memadai.<sup>17</sup> Plastik menimbulkan ancaman signifikan, menyebabkan hewan laut terjatuh dan mengganggu habitat.<sup>18</sup> Tumpahan minyak mencemari air dan organisme laut, sementara pembuangan bahan kimia dari pertanian dan industri menyebabkan eutrofikasi yang menciptakan zona kematian tanpa kehidupan laut lagi. Polutan ini tidak hanya merusak keanekaragaman hayati tetapi juga mempengaruhi mata pencaharian komunitas yang bergantung pada sumber daya laut, memperburuk ketahanan pangan dan ketidakstabilan ekonomi di wilayah tersebut.

## DINAMIKA GENDER DALAM KEAMANAN LINGKUNGAN MARITIM

Terdapat banyak contoh kasus dimana perempuan berperan sangat penting namun jarang diangkat dalam setiap aspek perikanan di kawasan Coral Triangle, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga proses pasca panen. Kontribusi multisektoral perempuan yang sangat luas meskipun sering terabaikan ini secara signifikan mendukung ekonomi biru berkelanjutan di wilayah tersebut, seperti pada perikanan tangkap liar dan akuakultur, penjualan dan pemasaran, konservasi, dan pariwisata. Meskipun keterlibatan mereka sangat penting, kebijakan dan intervensi yang ada saat ini

---

<sup>13</sup> T.R. Sobha, C.P. Vibija, and P. Fahima, "Coral Reef: A Hot Spot of Marine Biodiversity," *Conservation and Sustainable Utilization of Bioresources*, Sustainable Development and Biodiversity, 30 (January 6, 2023): 171–94.

<sup>14</sup> The Asia Foundation, "Trade in the Sulu Archipelago: Informal Economies Amidst Maritime Security Challenges" (San Francisco: The Asia Foundation, October 2019), <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/10/Trade-in-the-Sulu-Archipelago-Informal-Economies-Amidst-Maritime-Security-Challenges.pdf>.

<sup>15</sup> Asian Development Bank, "State Of The Coral Triangle: Indonesia" (Mandaluyong City, Philippines: ADB, 2014), <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42409/state-coral-triangle-indonesia.pdf>.

<sup>16</sup> National Geographic Society, "Marine Pollution," National Geographic, February 22, 2024, <https://education.nationalgeographic.org/resource/marine-pollution>.

<sup>17</sup> Asian Development Bank, "State Of The Coral Triangle: Indonesia."

<sup>18</sup> International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Plastic Pollution," *IUNC Issues Brief* (blog), May 2024, <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/plastic-pollution>.

dalam keamanan maritim seringkali tidak mengakui atau menangani tantangan unik dan kontribusi penting perempuan, sehingga diperlukan adanya pendekatan yang lebih inklusif terhadap tata kelola maritim.

## Perempuan dan Lingkungan Maritim

Perempuan memainkan peran penting dalam pengelolaan, manajemen, dan pemanfaatan sumber daya laut di kawasan Coral Triangle, serta memegang peran penting dalam ekonomi biru berkelanjutan sebagai tenaga kerja, baik dengan ataupun tanpa bayaran, dalam perikanan tangkap, akuakultur, konservasi, dan sektor pariwisata. Sayangnya, kontribusi perempuan secara rutin diabaikan dalam penelitian kebijakan, desain, dan implementasi, operasi penegakan hukum, dan intervensi pembangunan.<sup>19</sup>

Perempuan terlibat dalam setiap rantai pasok industri perikanan meskipun peran mereka sering kali diabaikan dan dianggap rendah akibat persepsi bahwa perikanan adalah industri yang maskulin. Secara global, sekitar separuh tenaga kerja di sektor perikanan adalah perempuan.<sup>20</sup> Sementara pria mendominasi industri penangkapan ikan di lepas pantai dan tengah laut, perempuan terlibat dalam penangkapan ikan di pesisir.<sup>21</sup> (aktivitas yang menggunakan peralatan dasar atau tanpa peralatan sama sekali), dan kegiatan akuakultur dan marikultur. Di sektor pasca panen, perempuan berperan sebagai pengolah, pedagang, pemasar bisnis, dan pembeli. Mereka juga membuat dan memperbaiki peralatan pancing serta memberikan pendanaan dan pinjaman kepada orang lain di sektor perikanan. Perempuan juga bertanggung jawab menjalankan pekerjaan rumah tangga, termasuk membesarkan anak-anak dan mengelola keuangan.

Secara krusial, perempuan dalam sektor perikanan dan akuakultur memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga dan komunitas. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di desa-desa pesisir di Timor-Leste menunjukkan bahwa pengumpul perempuan memiliki tingkat tangkapan yang lebih tinggi (100 persen) daripada pria (84 persen). Mereka menyediakan sumber protein penting untuk dikonsumsi masyarakat di negara yang sekitar 75 persen populasinya mengalami ketidakamanan pangan.<sup>22</sup>

Perempuan juga sangat terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya dan habitat laut sehingga terkadang mereka memiliki pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nelayan dan pengumpul sumber daya laut perempuan yang berinteraksi dengan lingkungan setiap harinya<sup>23</sup> akan memperhatikan perubahan ukuran dan kelimpahan spesies, reproduksi, dan distribusi, serta kesehatan habitat, yang dapat mempengaruhi proses pengumpulan mereka.<sup>24</sup> Sebagai pengumpul, pedagang, pemasar, dan pembeli, perempuan juga mungkin mengetahui kejahatan lingkungan maritim berdasarkan keterlibatan mereka dengan para nelayan, perantara, dan pedagang lainnya. Pengetahuan semacam itu akan sangat berharga jika disampaikan kepada otoritas keamanan. Pengolah dan pedagang

<sup>19</sup> U.S. Agency for International Development Sustainable Fish Asia Technical Support Activity, "Gender and Inclusive Development Action Plan (GIDAP)" (USAID, August 2022), [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00ZJZG.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00ZJZG.pdf).

<sup>20</sup> U.S. Agency for International Development Sustainable Fish Asia Technical Support Activity, "GIDAP."

<sup>21</sup> According to *Gender in Fishing*, gleaning is a fishing method used in shallow coastal, estuarine and freshwaters or in habitats exposed during low tide.

<sup>22</sup> Jenny House et al., "Women's Experiences of Participatory Small-Scale Fisheries Monitoring in Timor-Leste," *Maritime Studies* 23, no. 9 (February 5, 2024), <https://link.springer.com/article/10.1007/s40152-024-00352-6>.

<sup>23</sup> Nireka Weeratunge, Katherine A. Snyder, and Choo Poh Sze, "Gleaner, Fisher, Trader, Processor: Understanding Gendered Employment in Fisheries and Aquaculture," *Fish and Fisheries* 11, no. 4 (October 29, 2010): 405–20.

<sup>24</sup> Weeratunge, Snyder, and Sze, "Gleaner, Fisher, Trader, Processor: Understanding Gendered Employment in Fisheries and Aquaculture."

perempuan juga dapat menggunakan daya beli mereka untuk menerapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan. Sebagai contoh, umumnya pengolah kepiting rajungan perempuan di Indonesia hanya membeli kepiting dengan ukuran tangkapan yang diizinkan dan tidak membeli kepiting betina yang sedang bertelur sesuai dengan peraturan penangkapan ikan yang diterapkan.<sup>25</sup>

## Dampak Kejahatan Lingkungan Maritim dari Sisi Gender

Kejahatan lingkungan maritim mengancam ketahanan pangan masyarakat pesisir dan perempuan serta gadis yang tinggal di dalamnya dengan berbagai cara. Di lingkup keluarga, penangkapan ikan ilegal, kejahatan perikanan, dan penghancuran habitat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan penurunan sumber protein untuk dijual dan dikonsumsi rumah tangga. Perempuan sering berpuasa agar anak-anak mereka mendapatkan makanan berprotein yang cukup, yang justru dapat mengakibatkan risiko kurang gizi bagi perempuan tersebut. Secara ekonomi, kejahatan di laut menyebabkan hilangnya sumber daya perikanan dan sumber daya laut yang penting secara komersial, dan akibatnya perempuan kehilangan pekerjaan atau pendapatannya. Ketika pendapatan dan komoditas rumah tangga menurun, perempuan mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana yang cukup untuk pendidikan anak-anak, akses kesehatan keluarga, atau tabungan rumah tangga. Penurunan pendapatan dan sumber daya rumah tangga juga dapat menyebabkan peningkatan stres dan penurunan ekonomi di rumah tangga, yang berkontribusi pada peningkatan kekerasan berbasis seksual dan gender (SGBV).<sup>26</sup>

Perempuan juga memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi rumah tangga melalui pekerjaan di sektor ekonomi maritim, seperti menenun dan memperbaiki jaring, membersihkan, mengolah, memasarkan, dan menjual ikan, mengumpulkan sumber daya laut, serta menjalankan kegiatan akuakultur dan marikultur.<sup>27</sup> Sebagian besar dari pekerjaan ini dilakukan tanpa upah dan berbahaya. Di Indonesia misalnya, perempuan yang membuat dan memperbaiki jaring dapat mengalami cedera pada tangan atau tubuh mereka akibat limbah plastik yang tidak dikelola dengan baik.

Kejahatan lingkungan maritim yang menyebabkan penurunan jumlah stok ikan juga membuat usaha penangkapan ikan semakin sulit, seperti contohnya nelayan harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk mencari ikan dan meninggalkan keluarga mereka lebih lama dengan hasil tangkapan yang semakin menurun. Akibatnya, pekerjaan tidak dibayar yang dilakukan oleh perempuan untuk mendukung usaha penangkapan ini juga ikut terdampak. Hal ini menghabiskan waktu dan meningkatkan beban kerja perempuan diluar pekerjaan rumah tangga, perawatan anak, tugas keluarga, dan pekerjaan berbayar yang juga menjadi kewajiban mereka. Semua faktor tersebut dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan melalui penambahan stres mental, fisik, dan emosional.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> United Nations Development Programme, "Women Spearheading Sustainable Production of Blue Swimming Crab in Indonesia," UNDP, June 7, 2019,

<https://www.undp.org/indonesia/news/women-spearheading-sustainable-production-blue-swimming-crab-indonesia>.

<sup>26</sup> Kumara Anggita, "How the Fisherwomen of Java Rise above Climate Change and an Increase in Gender-Based Violence," Women's Resilience To Disasters Knowledge Hub, *Case Studies* (blog), October 31, 2021,

<https://wrd.unwomen.org/explore/insights/how-fisherwomen-java-rise-above-climate-change-and-increase-gender-based-violence>

<sup>27</sup> Arlene Nietes Satapornvanit, "The Importance of Gender in Fisheries: The USAID Oceans Experience," *Fish for the People* 16, no. 2 (2018), [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00WK6D.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WK6D.pdf).

<sup>28</sup> UN WomenWatch, "Women, Gender Equality and Climate Change" (United Nations, 2009),

[https://www.un.org/womenwatch/feature/climate\\_change/downloads/Women\\_and\\_Climate\\_Change\\_Factsheet.pdf](https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf).

Kejahatan lingkungan maritim juga berdampak pada mata pencaharian kaum laki-laki di sektor perikanan dan sumber daya laut, mengganggu stabilitas keluarga serta komunitas setempat.<sup>29</sup> Komunitas-komunitas di kawasan Coral Triangle umumnya memiliki norma gender yang mengharuskan laki-laki memiliki pencapaian tertentu seperti menikah, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki rumah, dan memiliki anak. Dampak kejahatan lingkungan maritim terhadap perikanan, sumber daya alam, dan pariwisata pesisir dapat mengurangi kesempatan kerja bagi laki-laki, sehingga menghalangi mereka mencapai pencapaian maskulin ini. Dalam situasi seperti itu, laki-laki, terutama pemuda (dan kadang-kadang perempuan muda), mungkin mencari bentuk pekerjaan lain seperti pertanian atau pertambangan, terlibat dalam aktivitas kriminal, atau bermigrasi ke daerah perkotaan atau luar negeri untuk mencapai pencapaian tersebut, seperti memiliki rumah dan memulai sebuah keluarga.<sup>30</sup>

Dalam situasi seperti itu, baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban perdagangan manusia atau kerja paksa.<sup>31</sup> Laki-laki yang bertahan di sektor perikanan dapat menjadi korban praktik perekrutan yang tidak jujur dan bekerja dalam janji-janji palsu. Lebih parahnya lagi, laki-laki dapat diperdagangkan ke kapal penangkap ikan jarak jauh milik asing, di mana mereka mungkin dipaksa bekerja di laut selama bertahun-tahun dalam kondisi kerja yang tidak aman dan tidak manusiawi, tunduk pada keadaan mirip perbudakan dan tidak diberikan upah atau perlindungan hukum.<sup>32</sup> Kasus Pulau Benjina pada tahun 2015 adalah bukti nyata. Lebih dari 4.000 nelayan asing diperdagangkan, terdampar, dan diperbudak di Pulau Benjina. Beberapa nelayan telah terjebak di Pulau Benjina selama lebih dari 20 tahun sampai akhirnya memiliki keluarga dengan perempuan setempat. Ketika otoritas Indonesia menyelamatkan dan memulangkan nelayan-nelayan yang terjebak, mereka memisahkan sang laki-laki dari keluarga tersebut. Memisahkan keluarga tidak hanya mengganggu hubungan dan struktur keluarga, tetapi juga meninggalkan banyak keluarga tanpa pencari nafkah utama.<sup>33</sup>

Perempuan juga mungkin mencari pekerjaan di operasi pengolahan ikan industri, di mana mereka juga dapat menjadi korban praktik perekrutan yang tidak jujur alias curang, penahanan gaji dan dokumen identitas, pelecehan fisik dan seksual, serta kondisi kerja yang tidak aman.<sup>34</sup> Hal ini paling sering terjadi di Indonesia yang memiliki industri penangkapan ikan dan pengolahan ikan domestik yang kuat, serta memiliki lebih dari 2,3 juta warga negara yang bekerja

---

<sup>29</sup> Faith Ngum and Radha Barooah, "Impact of Biodiversity Loss and Environmental Crime on Women from Rural and Indigenous Communities Evidence from Ecuador, Mexico, Cameroon, and Indonesia" (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, October 2023), <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/10/Faith-Ngum-Radha-Barooah-Impact-of-biodiversity-loss-and-environmental-crime-on-women-from-rural-and-indigenous-communities-GI-TOC-October-2023.v3.pdf>.

<sup>30</sup> Elizabeth Jones, "The Environmental and Socioeconomic Effects of Overfishing Due to the Globalization of the Seafood Industry" (Thomas Jefferson University | College of Science, Health, and the Liberal Arts), accessed June 10, 2024, <http://www.philau.edu/collegestudies/Documents/Elizabeth%20Jones.pdf>.

<sup>31</sup> United States Department of Justice, "Task Force on Human Trafficking in Fishing in International Waters" (United States Department of Justice, January 2021), <https://www.justice.gov/crt/page/file/1360366/dl?inline#:~:text=Beyond%20the%20significant%20human%20costs,13%20and%20the%20international%20community.>

<sup>32</sup> Environmental Justice Foundation, "Blood and Water: Human Rights Abuse in the Global Seafood Industry" (London, United Kingdom: EJF, May 6, 2019), <https://ejfoundation.org/reports/blood-and-water-human-rights-abuse-in-the-global-seafood-industry>.

<sup>33</sup> Associated Press, "4,000 Foreign Fishermen Stranded on Remote Indonesian Islands," *The Guardian*, March 28, 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/28/4000-foreign-fishermen-stranded-on-remote-indonesian-islands>.

<sup>34</sup> National Oceanic and Atmospheric Administration, "Human Trafficking in the Seafood Supply Chain," Report to Congress, National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, December 23, 2020, [https://media.fisheries.noaa.gov/2020-12/DOSNOAARepor\\_HumanTrafficking.pdf](https://media.fisheries.noaa.gov/2020-12/DOSNOAARepor_HumanTrafficking.pdf).

di kapal penangkap ikan milik asing.<sup>35</sup> Pekerja perempuan dari provinsi pedalaman menjadi sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di industri pengolahan ikan karena mereka bekerja jauh dari teman dan kerabat mereka.

Kejahatan lingkungan maritim mengurangi ketahanan habitat laut dan spesies terhadap dampak perubahan iklim seperti kerusakan akibat badai, pemutihan karang, dan habisnya jumlah stok ikan. Hal ini dapat semakin memperburuk ancaman dan kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan terhadap perubahan iklim dan bencana berupa peningkatan kekerasan berbasis seksual dan gender (SGBV), pengungsian, dan kurangnya akses kesehatan. Guncangan iklim mempengaruhi kelayakan ekonomi industri maritim yang melibatkan banyak perempuan, seperti budidaya rumput laut. Di Indonesia, perempuan adalah kontributor utama dalam industri budidaya rumput laut, dengan lebih dari satu juta perempuan bekerja di industri tersebut. Namun, akibat suhu laut yang menghangat dan pola cuaca yang semakin tidak menentu, timbulah penyakit yang mengakibatkan kematian rumput laut yang merugikan omset.<sup>36</sup>

Interseksionalitas berbagai identitas<sup>37</sup> memperburuk ketidakamanan ini. Perempuan yang tinggal di daerah pedesaan; bagian dari komunitas adat, tanpa kewarganegaraan, atau terpinggirkan; memiliki disabilitas mental atau fisik; atau sudah lanjut usia sangat rentan terhadap dampak kejahatan lingkungan maritim terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan mereka karena mereka berada lebih jauh di luar jaring pengaman sosial dan pemerintah.<sup>38</sup>

Penting untuk diingat bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban atau sumber informasi dari kejahatan lingkungan maritim, mereka juga bisa menjadi pelaku kejahatan tersebut. Sama seperti halnya laki-laki, alasan perempuan terlibat dalam kejahatan lingkungan maritim sangat kompleks.<sup>39</sup> Perempuan ikut terlibat atau membiayai kejahatan lingkungan maritim seperti penangkapan ikan IUU dan perdagangan satwa liar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka. Alasan yang sama dapat mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan penyelundupan atau menjadi perekrut atau perantara bagi para pelaku perdagangan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan maritim dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor sosial ekonomi yang mendorong individu, baik perempuan, laki-laki, maupun individu non-biner, untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> International Organization for Migration, "Report on Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industry" (coventry university, 2016), <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/country/docs/indonesia/Human-Trafficking-Forced-Labour-and-Fisheries-Crime-in-the-Indonesian-Fishing-Industry-IOM.pdf>.

<sup>36</sup> UN Women, "How Gender Inequality and Climate Change Are Interconnected," *Explainer* (blog), February 28, 2022, <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>.

<sup>37</sup> "Intersectional identity" refers to the complex and multifaceted nature of an individual's social identity, which is shaped by various factors such as race, gender, class, sexuality, disability, nationality, and other dimensions of identity. Coined by legal scholar Kimberlé Crenshaw in 1989, intersectionality highlights how different forms of discrimination and oppression can intersect and overlap, resulting in unique experiences of privilege or marginalization for individuals who embody multiple identities.

<sup>38</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, "Tackling Crimes That Affect Our Ocean" (UNODC, May 30, 2024), [https://www.unodc.org/documents/Maritime\\_crime/UNODC\\_Tackling\\_Crimes\\_that\\_Affect\\_our\\_Ocean.pdf](https://www.unodc.org/documents/Maritime_crime/UNODC_Tackling_Crimes_that_Affect_our_Ocean.pdf).

<sup>39</sup> Jessica S. Kahler and Marisa A. Rinkus, "Women and Wildlife Crime: Hidden Offenders, Protectors and Victims," *Oryx* 55, no. 6 (November 2021): 835–43, <https://doi.org/10.1017/S0030605321000193>.

<sup>40</sup> Kahler and Rinkus, "Women and Wildlife Crime: Hidden Offenders, Protectors and Victims."

# IMPLEMENTASI WPS DALAM KEJAHATAN LINGKUNGAN MARITIM

## Mengenal Agenda WPS

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1325 (UNSCR 1325) diadopsi sebagai agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan pada tanggal 31 Oktober 2000.<sup>41</sup> Resolusi ini menekankan peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, negosiasi perdamaian, pembangunan perdamaian, penjagaan perdamaian, respons kemanusiaan, dan dalam rekonstruksi pasca konflik, sambil menekankan pentingnya partisipasi setara dan keterlibatan penuh mereka dalam semua upaya untuk pemeliharaan dan promosi perdamaian dan keamanan. UNSCR 1325 juga mendorong semua negara anggota untuk mengkodekan kebijakan nasional untuk implementasi WPS mereka sendiri melalui Rencana Aksi Nasional WPS (NAP WPS). Selain itu, resolusi ini mengimbau semua negara anggota untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan mengintegrasikan perspektif gender dalam semua upaya PBB dalam perdamaian dan keamanan, serta mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender selama krisis dan konflik.<sup>42</sup>

Meskipun lingkup dari resolusi yang fokus utamanya adalah pada situasi pasca konflik ini sangat luas, Resolusi ini sudah diaplikasikan secara signifikan dalam 24 tahun terakhir. Sebagai contoh, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang memerangi kejahatan terorganisir lintas negara di laut melalui program Global Maritime Crime Programme (GMCP) -nya, telah berupaya untuk menerapkan UNSCR 1325 dalam perencanaan dan implementasi operasinya.<sup>43</sup> Agenda WPS juga telah berkembang untuk menekankan perlunya mempertimbangkan berbagai cara di mana gender mempengaruhi isu keamanan dengan mengintegrasikan perspektif gender. Lebih dari sekadar melibatkan perempuan secara setara di semua tingkatan kepemimpinan, perspektif gender meningkatkan pendekatan dalam memerangi kejahatan lingkungan dan aktivitas maritim ilegal seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perdagangan buruh, dan penyelundupan senjata. Mengakui adanya dinamika gender ini sangat penting untuk intervensi dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif di kawasan Coral Triangle.

Seiring meningkatnya kesadaran global tentang keterkaitan antara kelestarian lingkungan maritim dan keamanan nasional, perhatian tertuju pada tantangan mendesak yang ditimbulkan oleh persaingan untuk sumber daya. Degradasi laut menyebabkan ketidakstabilan yang mempengaruhi komunitas di darat maupun di laut, terutama di kawasan Coral Triangle. Meskipun perempuan merupakan bagian penting dari tenaga kerja di sektor perikanan, kerentanan mereka terhadap kejahatan lingkungan maritim sering kali tidak diakui sepenuhnya. Mengatasi kompleksitas kejahatan lingkungan maritim menjadi lebih efektif ketika memasukkan prinsip WPS. Mengintegrasikan perspektif gender dalam strategi keamanan dan perencanaan operasional akan mempromosikan inklusivitas yang menghasilkan solusi komprehensif. Pendekatan ini meningkatkan stabilitas dan keamanan di masyarakat dengan mengakui kontribusi unik dan kerentanan semua anggota masyarakat. Strategi gender yang transformatif dalam penanganan kejahatan maritim tidak hanya meningkatkan keamanan nasional tetapi juga memperkuat kelestarian di kawasan Coral Triangle.

<sup>41</sup> United Nations Security Council, "Landmark Resolution on Women, Peace and Security," United Nations, October 31, 2000, <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/>.

<sup>42</sup> United Nations Security Council, "The Four Pillars of United Nations Security Council Resolution 1325," United Nations, accessed June 12, 2024, <https://www.un.org/shestandsforpeace/content/four-pillars-united-nations-security-council-resolution-1325>.

<sup>43</sup> United Nations, "Oceans and the Law of the Sea," United Nations (United Nations), accessed March 26, 2024, <https://www.un.org/en/global-issues/oceans-and-the-law-of-the-sea>.

## Menerapkan Agenda WPS pada Keamanan Lingkungan Maritim

Mengintegrasikan prinsip-prinsip dari agenda WPS sangat penting dalam mengatasi kejahatan lingkungan maritim di kawasan Coral Triangle karena hal itu mempromosikan partisipasi inklusif, memperkuat perlindungan kelompok rentan, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta mendukung kesetaraan gender dan ketahanan komunitas. Empat pilar agenda WPS - Partisipasi, Perlindungan, Pencegahan, dan Pemulihan - memberikan kerangka kerja komprehensif untuk mengatasi tantangan ini secara inklusif dan lebih efektif, dengan pendekatan gender transformatif.<sup>44</sup>

### Pilar Partisipasi dalam Agenda WPS dan Keamanan Lingkungan Maritim

Pilar partisipasi menekankan pentingnya inklusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat. Dalam konteks kejahatan lingkungan maritim, ini berarti melibatkan perempuan dalam tata kelola dan pengelolaan sumber daya laut. Perempuan di komunitas pesisir sering memiliki pengetahuan tradisional berharga tentang ekosistem laut dan terlibat secara intensif dalam perikanan dan akuakultur. Pemberdayaan perempuan melalui program peningkatan kapasitas dan kesempatan kepemimpinan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan dan mekanisme penegakan hukum. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dijelajahi dalam laporan lengkap terkait pilar Partisipasi dalam konteks keamanan lingkungan maritim:

- Pemberdayaan Perempuan dalam Penegakan Hukum dan Konservasi
- Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
- Inisiatif Perlindungan dan Konservasi Laut yang Dipimpin oleh Perempuan
- Kesadaran Publik dan Advokasi

## Pendekatan Gender Transformatif

Pendekatan transformasional tidak hanya fokus pada "kesenjangan" atau sekadar mengakui perbedaan gender atau menambahkan perempuan ke dalam suatu proses. "Perubahan struktural" adalah kata kunci dalam pemrograman yang transformasional gender. Bukti menunjukkan bahwa transformasi gender membutuhkan investasi berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk mengubah perilaku; peran gender, norma, dan dinamika kekuatan struktural; serta struktur legislasi dan institusional. Memberdayakan perempuan dan gadis serta menaruh mereka di posisi pengambilan keputusan adalah bagian integral dari perubahan transformasional. Orang dari semua gender, khususnya laki-laki dan anak laki-laki, harus terlibat secara aktif sebagai pendukung kesetaraan gender dan agen perubahan transformasional. Aksi kolektif di semua lapisan masyarakat mulai dari tingkat individu hingga tingkat sistematis sangat penting.

---

<sup>44</sup> United States Institute of Peace, "What Is UNSCR 1325? An Explanation of the Landmark Resolution on Women, Peace and Security," accessed June 11, 2024, [https://www.usip.org/gender\\_peacebuilding/about\\_UNSCR\\_1325](https://www.usip.org/gender_peacebuilding/about_UNSCR_1325).

## **Pilar Perlindungan dalam Agenda WPS dan Keamanan Lingkungan Maritim**

Pilar perlindungan berfokus pada menjaga hak-hak perempuan dan memastikan keselamatan mereka dalam situasi konflik dan pasca-konflik. Menerapkannya dalam konteks kejahatan lingkungan maritim melibatkan perlindungan perempuan dari kekerasan dan eksploitasi yang terkait dengan penangkapan ikan IUU dan perdagangan satwa liar. Perempuan di komunitas pesisir berisiko menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja dalam operasi penangkapan ikan ilegal. Memperkuat kerangka hukum dan penegakannya, bersama dengan akses layanan dukungan bagi korban, dapat mengurangi risiko ini. Aspek di mana pilar Perlindungan berlaku untuk kejahatan lingkungan maritim adalah sebagai berikut:

- Mata Pencaharian dan Ketahanan Pangan
- Dampak Kesehatan
- Kekerasan Seksual dan Berbasis Gender
- Lingkungan Kerja yang Tidak Aman

## **Pilar Pencegahan dalam Agenda WPS dan Keamanan Lingkungan Maritim**

Tujuan utama pilar pencegahan adalah mengatasi akar masalah penyebab konflik dan ketidakamanan. Dalam konteks kejahatan lingkungan maritim, faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan sistem pemerintahan yang lemah turut berkontribusi pada bermunculannya aktivitas-aktivitas ilegal. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan peluang ekonomi dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan keterlibatan dalam kejahatan lingkungan. Program pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan perempuan juga dapat meningkatkan deteksi dini dan pencegahan terhadap kegiatan ilegal. Cara-cara berikut bisa digunakan untuk menerapkan pilar Pencegahan pada keamanan lingkungan maritim:

- Pencegahan Langsung melalui Pendidikan dan Peran Serta Aktif
- Pencegahan Langsung melalui Penegakan Hukum
- Kerangka Hukum dan Penegakan yang Responsif Gender
- Inovasi dan Teknologi
- Mencegah Tergerusnya Resiliensi Perempuan

## **Pilar Pertolongan dan Pemulihan dalam Agenda WPS serta Keamanan Lingkungan Maritim**

Pilar pertolongan dan pemulihan fokus pada pemenuhan kebutuhan perempuan dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi. Dalam konteks kejahatan lingkungan maritim, ini berarti mendukung perempuan di komunitas yang terkena dampak untuk membangun kembali mata pencaharian mereka dan memulihkan ekosistem laut. Program yang menyediakan bantuan finansial, pelatihan, dan sumber daya untuk perikanan dan akuakultur berkelanjutan dapat membantu perempuan pulih dari dampak ekonomi kejahatan lingkungan. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam proyek restorasi habitat dapat meningkatkan ketahanan komunitas setempat dan mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pembahasan lengkap tentang aplikasi pilar Pertolongan dan Pemulihan untuk keamanan lingkungan maritim adalah sebagai berikut ini:

- Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Upaya Pemulihan
- Pertolongan dan Dukungan Keamanan Manusia yang Terarah
- Menciptakan Resiliensi Jangka Panjang

Menerapkan empat pilar Agenda WPS dalam menangani kejahatan lingkungan maritim di kawasan Coral Triangle akan memastikan perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan perempuan di komunitas-komunitas di kawasan tersebut diprioritaskan. Partisipasi perempuan dalam penegakan hukum dan konservasi, dikombinasikan dengan strategi perlindungan, pencegahan, pertolongan, dan pemulihan yang terarah, dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas upaya tersebut sambil mempromosikan kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan di saat yang sama.

## **KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM MENGENDALIKAN KEJAHATAN LINGKUNGAN MARITIM DI KAWASAN CORAL TRIANGLE: KEUNTUNGAN BEKERJA SAMA DENGAN ORGANISASI PEREMPUAN**

Mengatasi kejahatan lingkungan maritim lintas negara memerlukan kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor pertahanan. Kebutaan gender yang terjadi di banyak kerangka kerja maritim regional dan kemitraan sipil-militer (civ-mil) saat ini justru memberikan peluang untuk mendorong integrasi perspektif gender ke dalam strategi negara dalam memerangi kejahatan, bantuan kemanusiaan, dan inisiatif tanggap bencana (HA/DR) ke depannya. Kemitraan civ-mil akan meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan pemberdayaan yang penting untuk respons yang efektif.<sup>45</sup> Kemitraan antara organisasi sipil (seperti LSM, lembaga pemerintah, dan komunitas lokal) dan angkatan bersenjata lebih efektif ketika menangani tantangan kompleks ini karena adanya pendekatan menyeluruh dari sisi masyarakat, dimana hal tersebut sangat penting dalam konteks kejahatan lingkungan maritim dan konflik lintas batas. Kemitraan ini dapat meningkatkan efektivitas respon dan mempromosikan solusi berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang khususnya dimiliki kedua sektor tersebut. Organisasi sipil menyediakan keahlian dalam keterlibatan komunitas, bantuan kemanusiaan, dan pengembangan jangka panjang, sementara angkatan bersenjata memberikan dukungan logistik, keamanan, dan kemampuan manajemen krisis.<sup>46</sup>

### **Batasan dan Tantangan Hubungan Sipil-Militer**

Biar pun kemitraan sipil-militer menciptakan manfaat besar, mereka menghadapi tantangan yang akar masalahnya dinamis secara historis maupun kontemporer. Yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan netralitas organisasi sipil dalam kolaborasi semacam ini untuk menjaga integritas LSM dan memastikan mereka melayani kepentingan publik yang lebih luas di atas tujuan politik. Aktor kemanusiaan termasuk militer seringkali mampu membuka akses ke populasi yang terdampak krisis tetapi akhirnya kesulitan ketika membuat strategi bantuan kemanusiaan dan respons bencana (HA/DR) yang sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>47</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum maritim dan lingkungan yang efektif dan tidak merugikan memerlukan dialog dan interaksi yang berkelanjutan antara aktor sipil-militer.<sup>48</sup> Hubungan sipil-militer yang tidak harmonis akibat konflik masa lalu, terutama di negara-negara Indo-Pasifik yang memiliki sejarah

---

<sup>45</sup> Allard-Jan tan Berge, "Best & Bad Practices on Civil-Military Interaction" (The Netherlands: Civil-Military Cooperation Centre of Excellence, June 2014), <https://nllp.jallc.nato.int/IKS/Sharing%20Public/Civil-Military%20Interaction%20Best%20and%20Bad%20Practices%20Handbook.pdf>.

<sup>46</sup> US Department of Defense, Joint Force Development, "Civil-Military Operations," Joint Publication 3-57, July 9, 2018, [https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3\\_57.pdf?ver=2018-09-13-134111-460](https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_57.pdf?ver=2018-09-13-134111-460).

<sup>47</sup> Cook & Yogendran, "Conceptualising Humanitarian Civil-Military"

<sup>48</sup> Cook & Yogendran, "Conceptualising Humanitarian Civil-Military"

intervensi militer, mempersulit lahirnya kemitraan yang bermakna. Hambatan lainnya termasuk ketika aktor sipil dan militer secara rutin "mengadopsi tujuan dan prinsip yang berbeda, memperebutkan ranah tanggung jawab, dan memiliki gagasan yang tidak sejalan tentang pendekatan militer apa yang diperlukan dalam keadaan darurat bencana."<sup>49</sup>

Berkaca dari perspektif feminis terhadap perdamaian dan keamanan, kemitraan sipil-militer juga berisiko menciptakan hubungan hierarkis antar lembaga yang mengakibatkan munculnya eksploitasi terhadap pengetahuan, waktu, tenaga, dan/atau kesejahteraan perempuan dan organisasi masyarakat sipil perempuan. Memang, banyak yang berargumen bahwa "militerisasi tanggap bencana tidak ada untungnya bagi angkatan bersenjata, organisasi tanggap bencana sipil atau masyarakat secara luas."<sup>50</sup> Tantangan ini memerlukan keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan menangani berbagai kebutuhan keamanan manusia guna menjembatani kesenjangan antara bidang militer dan sipil.

## Bentuk Kerjasama Ideal Antara Sipil-Militer

Selama Proyek ini berlangsung, peserta dilibatkan dalam dialog tentang cara memperkuat kerjasama sipil-militer yang terbuka dan produktif berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Berikut adalah daftar metode menciptakan kerjasama ideal antara sipil-militer yang dikembangkan oleh peserta dengan fokus pada membangun kepercayaan:<sup>51</sup>

- Menciptakan lingkungan inklusif di mana perempuan, laki-laki, dan orang non-biner, serta kelompok masyarakat rentan lainnya, dapat bebas berbicara tentang kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
- Membangun jalur komunikasi yang jelas dan mudah serta mekanisme koordinasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan.
- Menghormati mandat, peran, dan keahlian setiap pihak dengan asas kolaborasi dan saling melengkapi.
- Melakukan latihan bersama untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemahaman yang sama terkait kemampuan dan keterbatasan masing-masing pihak.
- Mendirikan mekanisme pelaporan yang jelas dan aman untuk setiap kasus penyelewengan tenaga kerja dan kekerasan berbasis gender di militer, lembaga penegak hukum, dan dalam masyarakat sipil.
- Prioritaskan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak, terutama terkait bantuan kemanusiaan dan perencanaan tanggap bencana demi memastikan upaya yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional serta mengintegrasikan perspektif gender.
- Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam kegiatan kemitraan, serta berinteraksi dengan komunitas dan pemangku kepentingan setempat untuk memastikan partisipasi dan rasa saling memiliki terhadap upaya tanggap bencana.
- Merancang anggaran yang sesuai untuk mendukung kerjasama sipil-militer dalam jangka panjang.

Dengan adanya kerjasama sipil-militer yang mengintegrasikan perspektif gender, tingkat efektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan upaya tanggapan meningkat, yang pada akhirnya melahirkan hasil yang lebih adil bagi semua masyarakat yang terdampak. Menggabungkan perspektif gender dalam kemitraan sipil-militer membutuhkan pemahaman atas pengakuan, kebutuhan, kerentanan, dan kapasitas yang khusus dari setiap gender yang terdampak krisis. Penggabungan

<sup>49</sup> Myriame Bollen and Jori Pascal Kalkman, "Civil-Military Cooperation in Disaster and Emergency Response Practices, Challenges, and Opportunities," *Journal of Advanced Military Studies* 13, no. 1 (2022): 79–91.

<sup>50</sup> Bollen and Kalkman, "Civil-Military Cooperation in Disaster and Emergency Response Practices, Challenges, and Opportunities."

<sup>51</sup> Berge, "Best & Bad Practices on Civil-Military Interaction."

tersebut harus memastikan partisipasi aktif perempuan dan kelompok gender yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, mengintegrasikan pertimbangan gender dalam desain dan implementasi program, serta mengatasi kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Alhasil, pendekatan yang mengadopsi strategi gender transformatif dalam kemitraan sipil-militer, ketika sudah mulai tercermin secara institusional dan sistematis, akan memperlancar arus perubahan secara bertahap dan struktural di dalam norma-norma gender saat ini masih timpang.

## **GENDER DALAM KERANGKA REGIONAL DAN KERJASAMA LINTAS BATAS**

Banyak kejahatan lingkungan maritim di kawasan Coral Triangle bersifat lintas batas sehingga diperlukan upaya kerjasama dalam pemantauan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dan penuntutan di antar negara di kawasan tersebut.<sup>52</sup> Meskipun kerjasama lintas batas sering terjadi melalui perjanjian bilateral, hal tersebut juga seringkali difasilitasi oleh organisasi regional dan internasional serta kerangka kerjasama multilateral. Berikut adalah ringkasan kerangka tata kelola regional yang menyoroti elemen gender dan area mana saja yang perlu ditingkatkan.

### **Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)**

The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) adalah kerjasama multilateral yang bertujuan memerangi kemiskinan melalui pembangunan ekonomi, keamanan pangan, dan mata pencaharian berkelanjutan.<sup>53</sup> Negara-negara anggota bekerja sama untuk melindungi sumber daya laut dan pesisir di kawasan Coral Triangle, mengatasi tantangan kritis regional seperti penurunan jumlah stok ikan, perubahan iklim, keamanan pangan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, CTI-CFF juga mendukung upaya untuk mengatasi kejahatan lingkungan maritim di luar penangkapan ikan secara ilegal, termasuk perdagangan satwa liar dan polusi. Sebagai solusi dari minimnya data yang tersedia di kawasan ini, CTI-CFF berinisiatif mengumpulkan data tentang kelimpahan spesies, habitat laut, ancaman, dan area perlindungan, yang beberapa diantaranya bisa diakses melalui Coral Triangle Atlas<sup>54</sup>

Termasuk di dalam CTI-CFF adalah Women Leaders' Forum, yang merupakan forum pemimpin perempuan yang berperan aktif di bidang konservasi laut kawasan Coral Triangle. Forum ini mengangkat pentingnya inklusi perspektif perempuan dan gadis dalam rencana tindakan regional dan membangun kapasitas perempuan terutama di tingkat *grassroot* dalam memimpin upaya perlindungan keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Inisiatif ini mendukung komitmen CTI-CFF dalam mengintegrasikan pertimbangan gender, kesetaraan, dan inklusi sosial ke dalam program-program mereka baik secara institusi maupun per setiap negara anggota.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Sarah A. Heck, "Ocean Governance in the Coral Triangle: A Multi-Level Regulatory Governance Structure," *Politics and Governance* 10, no. 3 (July 14, 2022): 70–79.

<sup>53</sup> UN Department of Economic and Social Affairs, "The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)."

<sup>54</sup> Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security, "The Coral Triangle Atlas."

<sup>55</sup> Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security, "CTI Women Leaders' Forum," November 6, 2017, <https://www.coraltriangleinitiative.org/wlf>.

## Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU)

The Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU) adalah inisiatif yang bersifat tidak mengikat dan bisa dilakukan secara sukarela untuk memerangi penangkapan ikan IUU di perairan regional Asia Tenggara. RPOA-IUU mempublikasikan pergerakan dan penampakan kapal yang dicurigai melakukan penangkapan ikan IUU. Sekretariatnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia di Jakarta.<sup>56</sup> Namun, negara-negara anggota tidak diwajibkan untuk membuat program atau mengimplementasikan prioritas regional dalam hukum dan kebijakan domestik karena RPOA-IUU adalah organisasi sukarela.<sup>57</sup> Contoh, Daftar Pergerakan dan Penampakan Kapal Ikan IUU tidak pernah diperbaharui lagi sejak tahun 2021. Selain itu, RPOA-IUU tidak memiliki inisiatif khusus terkait perempuan atau gender. Namun tetap, RPOA-IUU merupakan badan yang penting dalam mengumpulkan semua menteri dari Asia Tenggara, termasuk kawasan Coral Triangle, dan menghubungkan aktivitas regional ke organisasi internasional lain. Pendekatan “tenda besar” yang digunakan oleh pihak Sekretariat lebih berfokus kepada memperluas keanggotaan meskipun tidak semua anggota akan mengimplementasikan kebijakannya.

## ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi)

The ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) menopang ASEAN Senior Officials Meetings yang mengumpulkan para menteri perikanan dan agrikultur negara-negara ASEAN untuk memberikan dukungan teknis dan kebijakan terkait isu-isu perikanan.<sup>58</sup> ASWGFi memerangi upaya penangkapan ikan IUU melalui mekanisme yang berbeda, seperti Deklarasi Bersama ASEAN-SEAFDEC [Southeast Asian Fisheries Development Center] tentang Kerjasama Regional dalam Memerangi Penangkapan Ikan IUU.<sup>59</sup> Namun, grup ini tidak memiliki sub-grup yang fokus pada integrasi perspektif gender dalam perancangan solusi. Meskipun demikian, inisiatif ini sering merujuk pada *guideline* dari inisiatif lain yang sudah melakukannya, seperti Small-Scale Fisheries Guidelines dari FAO, dan mencantumkan isu-isu gender untuk dipertimbangkan dalam rencana tindakan strategisnya.<sup>60</sup>

## Partnership in Environmental Management for the Seas of Asia (PEMSEA)

Partnership in Environmental Management for the Seas of Asia (PEMSEA) adalah badan koordinasi regional untuk Sustainable Development Strategy for Seas of East Asia (SDS-SEA) yang tujuannya membangun ekonomi biru di kawasan tersebut sembari melindungi keanekaragaman hayati dan mendesain upaya adaptasi perubahan iklim. Negara-negara

---

<sup>56</sup> RPOA-IUU, “The Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing,” accessed June 10, 2024, <https://www.rpoaiuu.org/>.

<sup>57</sup> Department of Economic and Social Affairs, “Singapore’s Contributions to Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” United Nations, Sustainable Development, accessed June 12, 2024, <https://sdgs.un.org/partnerships/singapores-contributions-combating-illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>.

<sup>58</sup> The ASEAN Secretariat, “Fisheries Cooperation,” Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), accessed June 10, 2024, <https://asean.org/our-communities/economic-community/enhanced-connectivity-and-sectoral-development/asean-food-agriculture-and-forestry/fisheries-cooperation/>.

<sup>59</sup> The ASEAN Secretariat, “Fisheries Cooperation.”

<sup>60</sup> ASEAN Secretariat, “AMAF’s Approach to Gender Mainstreaming in the Food, Agriculture and Forestry Sectors” (Ha Noi, Viet Nam: ASEAN Secretariat, October 11, 2018), <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/AMAF-Approach-to-gender-mainstreaming.pdf>.

anggota mendukung program tentang polusi plastik laut dan pengelolaan pesisir yang terintegrasi.<sup>61</sup> Yang membuat PEMSEA berbeda dari organisasi regional lainnya adalah adanya partisipasi LSM dan lembaga akademis bersama dengan organisasi pemerintah daerah sampai nasional; namun dengan catatan lembaga ini tidak memiliki program khusus tentang gender atau kejahatan lingkungan maritim.

## **PEREMPUAN, HUKUM ADAT, DAN SITUASI KEAMANAN MARITIM**

Keseimbangan antara hukum adat dengan kerangka kerja nasional hingga internasional sangat penting dalam pengelolaan laut yang efektif di kawasan Coral Triangle, di mana praktik-praktik tradisional berakar pada pengetahuan ekologi dan nilai budaya. Modernisasi mengikis pengetahuan tradisional, sehingga terdapat urgensi dalam upaya penggabungan kerangka kerja ini. Perempuan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya dengan pengetahuan adatnya, namun di saat yang sama, adat seringkali membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Mengintegrasikan perspektif perempuan dan memastikan keterlibatan aktif mereka sangat penting untuk konservasi laut yang berkelanjutan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas setempat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum tradisional dan modern. Menciptakan lingkungan hukum yang menghormati hukum adat namun beradaptasi dengan nilai kesetaraan gender dan inklusi modern akan memberdayakan perempuan (bahkan melalui peran kepemimpinan informal) dan memperkuat ikatan sosial, sehingga melindungi sumber daya laut secara berkelanjutan di kawasan Coral Triangle.

## **REKOMENDASI TINDAKAN UNTUK MENINGKATKAN INTEGRASI KERJASAMA SIPIL-MILITER BERPERSPEKTIF GENDER UNTUK MENGATASI KEJAHATAN LINGKUNGAN MARITIM LINTAS BATAS**

Komunitas Belajar yang terdiri dari peserta seri Workshop Cross-Border Cooperation on WPS and Maritime Environmental Crimes in the Coral Triangle berkomitmen untuk kembali bertemu secara virtual di akhir Juli 2024 untuk membahas langkah selanjutnya. Sementara itu, para peserta merekomendasikan untuk melakukan hal-hal berikut:

- Melaporkan hasil kegiatan ke organisasi masing-masing dan ceritakan respon organisasi terhadap laporan tersebut kembali ke komunitas belajar.
- Cari tahu minat organisasi masing-masing peserta untuk mau aktif bergabung ke komunitas belajar.<sup>62</sup>
- Identifikasi sumber daya organisasi yang bisa atau tidak bisa dialokasikan:
  - Waktu
  - Finansial
  - Tenaga

<sup>61</sup> PEMSEA, "Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)," accessed June 10, 2024, <https://www.pemsea.org/>.

<sup>62</sup> Tidak masalah jika beberapa peserta tidak dapat mengumpulkan semua informasi yang diperlukan selama pertemuan karena tujuan utamanya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data untuk memahami situasi saat ini. Bahkan ketidakberadaan informasi dapat memberikan gambaran tentang sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah krusial ini

- Identifikasi *tools* dan sumber daya yang mungkin sebelumnya mereka tidak sadar miliki. Ceritakan *tools* dan sumber daya terkait gender dan kejahatan lingkungan maritim dengan semua anggota komunitas.
- Kumpulkan pertanyaan dan umpan balik terhadap dokumen laporan temuan penting dan laporan akhir.
- Berpartisipasi aktif dalam *group chat* dan diskusi yang diorganisir.
- Berikan saran terkait apa yang perlu ditambahkan ke dalam komunitas kepada panitia Workshop.
- Jaga hubungan antara LSM dengan aparat keamanan dan pertahanan.
- Coral Triangle Center (CTC) akan meminta izin kepada CTI-CFF untuk mempertimbangkan mengundang anggota komunitas ini menghadiri pertemuan WLF.
- Kumpulkan data lapangan tentang gender dan kejahatan lingkungan maritim dari komunitas setempat.
- Persiapan daftar rekomendasi aksi untuk pertemuan Komunitas Belajar selanjutnya.
- Panitia Workshop membagikan laporan temuan penting dan laporan akhir dengan peserta komunitas belajar yang akan diteruskan ke pihak-pihak berikut:
  - Sekretariat Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including to combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Practices in the Region (RPOA-IUU) Sekretariat [Diteruskan oleh Pedro Rodrigues, General Directorate of Fisheries, Aquaculture and Marine Resources, Timor-Leste, dan member Sekretariat RPOA-IUU].
  - Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Technical Working Group (TWG) dan Women Leaders Forum (WLF) [Diteruskan oleh Leilani Gallardo, Regional Communications and CTI Program Coordinator for CTC, Indonesia dan member WLF].
  - The ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) [Peserta komunitas yang tertarik bisa membantu meneruskan ke AFCF]
  - The ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), ASEAN Committee on Women (ACW), dan ASEAN Women Peace Security Advisory Group [Diteruskan oleh USINDOPACOM Office of WPS].
  - U.S. Agency for International Development (USAID) [Diteruskan oleh USINDOPACOM Office of WPS].
  - United States Institute of Peace (USIP) [Diteruskan oleh USINDOPACOM Office of WPS].
  - Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) SEA-IUU Fishing Program

Diskusi selanjutnya di akhir bulan Juli 2024 will akan berfokus pada uji kelayakan dibentuknya Komunitas Belajar resmi dengan misi yang jelas dan sumber daya yang didedikasikan untuk melanjutkan kerja yang dimulai dari workshop ini. Komunitas Belajar akan meningkatkan integrasi pendekatan yang sensitif gender dan kerjasama sipil-militer lintas batas lebih efektif memerangi kejahatan lingkungan maritim. Rekomendasi agenda pertemuan komunitas tahun ini meliputi:

- Uji kelayakan dalam membentuk komunitas ini.
- Merancang Community Action Plan yang sesuai dengan kapasitas komunitas.
- Mempertimbangkan perluasan keanggotaan komunitas ke semua negara Coral Triangle.
- Panitia dan anggota komunitas bekerjasama mencari pendanaan untuk pertemuan tatap muka di masa mendatang.
- Membuat rekomendasi praktis yang memperhitungkan ragam konteks di kawasan Coral Triangle untuk memastikan bahwa strategi yang ada bersifat inklusif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat terutama perempuan. Upaya kolaboratif ini akan membantu mengatasi kesenjangan yang ada

saat ini, mempromosikan sikap saling belajar, dan memfasilitasi pendekatan yang kokoh terhadap keamanan lingkungan maritim dengan memanfaatkan kemampuan masyarakat sipil dan militer. Komitmen untuk pertemuan rutin dan dialog berkelanjutan menegaskan dedikasi Komunitas dalam mendorong tujuan-tujuan ini dan membuka jalan bagi inisiatif inovatif dan berdampak di wilayah ini.

## KESIMPULAN

Proyek ini menekankan pentingnya integrasi agenda WPS ke dalam strategi untuk memerangi kejahatan lingkungan maritim di kawasan Coral Triangle. Adapun, proyek ini juga memperlihatkan komitmen kuat dari sektor militer dan sipil di Indonesia, Papua Nugini, dan Timor-Leste untuk bekerjasama lintas batas dalam mengadopsi pendekatan ini. Laporan ini telah mengkaji berbagai aspek dalam memerangi kejahatan lingkungan maritim, mulai dari persimpangan antara hukum adat dengan kerangka hukum modern hingga peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan, serta tantangan dan peluang yang muncul dari kemitraan sipil-militer dan kerjasama lintas negara.

Satu kesimpulan terpenting adalah perlunya integrasi perspektif gender yang lebih baik ke dalam semua aspek pengelolaan lingkungan laut. Perempuan adalah pemangku kepentingan yang sangat penting, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan ekologi tradisional, tetapi juga sebagai peserta aktif dalam pengelolaan sumber daya dan pengawasan lingkungan. Memberdayakan dan memastikan inklusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah penting menuju pencapaian konservasi dan pengelolaan laut yang komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, kolaborasi sipil-militer lintas batas negara menjadi semakin krusial dalam memerangi kejahatan lingkungan maritim. Dengan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, kita dapat mengatasi kesenjangan antara kerangka hukum tradisional dan modern, mempromosikan kesetaraan gender, serta memperkuat upaya penegakan hukum.

Ke depannya, memprioritaskan implementasi aksi yang direkomendasikan dalam laporan ini sangatlah penting. Rekomendasi-rekomendasi tersebut mencakup identifikasi potensi pembentukan Komunitas Belajar yang resmi dengan pendanaan dan sumber daya yang diperlukan untuk memfasilitasi dialog dan kolaborasi berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang Agenda WPS dan apa dampak positif penerapannya pada keamanan lingkungan maritim di wilayah Coral Triangle.

Dengan menggunakan agenda WPS dan peluang kolaborasi non tradisional, pengembangan strategi yang lebih efektif untuk memerangi kejahatan lingkungan maritim di kawasan Coral Triangle menjadi lebih realistis. Meskipun tantangannya besar, dengan upaya bersama dan tindakan kolektif, kita dapat bekerja menuju masa depan di mana lautan dilindungi, berkelanjutan, dan tangguh untuk generasi mendatang.